

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi daerah menjadi beberapa daerah atau provinsi, selanjutnya provinsi dibagi lagi dalam beberapa daerah kabupaten atau kota, dan di setiap kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah merumuskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 12).

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolannya menggunakan konsep desentralisasi. Maksud desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 7 UU No. 32 Tahun 2004).

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya berarti masyarakat mempunyai otonomi. Untuk menyelenggarakan otonominya tersebut, masyarakat di suatu daerah memiliki dewan perwakilan guna menampung dan menyalurkan aspirasi yang dimaksud. Otonomi daerah memberi ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi

juga subjek pembangunan, dengan partisipasi masyarakat secara optimal diharapkan pelaksanaan dan hasil pembangunan benar-banar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan pada masa Orde Baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proposional, karena hanya sebagai tangan kanan kepala desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini terlihat dari kekuasaan kepala desa yang mendekati diktator atau raja *absolute*, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya (Wikipedia, 2012).

Sebagai ganti LMD dan LKMD, pada tahun 2000 dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 Ayat 8 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa). Secara kelembagaan merupakan perwujudan kehidupan demokrasi di desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 29 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa). Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa dan penampung serta penyalur aspirasi masyarakat (Pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004).

Anggota BPD wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,

anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan masa jabatan anggotanya 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya (Pasal 30 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia, kelembagaannya dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri. Sebagaimana fungsinya yang disebut di atas, BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. Lembaga ini juga merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup desa (Nurcholis, 2005:140).

Melihat kedudukan dan fungsi BPD di atas, maka keberadaan BPD terkait erat dengan pembangunan di desa. Keterlibatan BPD dalam pembangunan merupakan bagian dari keterlibatan rakyat dalam pembangunan. Aktivitas pembangunan akan berhasil jika melibatkan partisipasi seluruh rakyat, dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan dilakukan secara bersama-sama, oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi dalam pembangunan bukan saja di dominasi jenis kelamin tertentu, tetapi harus merata, termasuk perempuan. Kaum waita menjadi salah satu kunci sukses untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, karena secara fungsional wanita menjadi bagian utama proses reproduksi yang

melahirkan anak sebagai asset yang disiapkan menjadi SDM berkualitas dalam pembangunan.

Berbagai tahapan pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi saat ini masih minim pemikiran mengenai keadilan gender. Banyak kasus diskriminasi dan ketidakadilan yang ditemukan. Berbagai kasus tersebut seperti, perbedaan hak wanita dalam memperoleh pendidikan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, seringkali merugikan kaum wanita. Namun seiring dengan perkembangan negara yang sedang membangun dan mengamankan kondisi sosial politik serta ekonominya, seluruh potensi sumber daya manusia diberdayakan termasuk wanita yang jumlahnya melebihi laki-laki.

Pemberdayaan wanita pada hakekatnya memberikan pilihan yang lebih banyak kepada wanita melalui perluasan keterjangkauan terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan keterampilan dan lapangan kerja serta menghilangkan berbagai ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender selama ini. Jadi dengan adanya perkembangan jaman, wanita bukan hanya menjadi bagian utama proses reproduksi yang melahirkan generasi penerus, namun juga sebagai pelaku pembangunan.

Keterlibatan wanita dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta wanita ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya dari BPD dalam mengembangkan peranan wanita dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran

dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi wanita dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan wanita (Wikipedia, 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang upaya BPD dalam mengembangkan peran wanita. Karena hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah, yang bagian materinya mengenai pemerintahan desa berikut otonominya.

Kajian mengenai peran BPD juga terkait erat dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya yang di sajikan di Kelas IX Semester I Standar Kompetensi (SK) adalah memahami pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Kompetensi Dasar (KD) adalah mendiskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah (BNSP, 2006:159).

Berdasarkan uraian materi PKn diatas yang terkait dengan tema penelitian di sajikan di Kelas IX Semester I mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, masyarakat di suatu daerah harus memiliki badan perwakilan guna menampung dan menyalurkan aspirasinya. Badan perwakilan tersebut diantaranya yaitu BPD. Badan ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan keterkaitan tema penelitian ini dengan PKN merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan kehidupan yang demokrasi menuju masyarakat madani. Peneliti menganggap penting mengkaji eksistensi BPD dalam mengembangkan peran wanita pada masyarakat desa, menciptakan kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam pengembangan peran wanita.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012?
2. Bagaimana upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi BPD dalam proses pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012?
4. Bagaimana solusi BPD dalam mengatasi masalah pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk memfokuskan penelitian maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan profil peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012.
2. Mendiskripsikan upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012.
3. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi BPD dalam proses pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012.
4. Mendiskripsikan solusi BPD dalam mengatasi masalah pengembangan peran wanita di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal Tahun 2012.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan konsep mengenai peran dan upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanita.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat lebih paham pada pemerintah desa
- b. Masyarakat lebih paham mengenai peran dan upaya BPD
- c. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk masukan guna optimalisasi dan kinerja BPD dalam pengembangan peran wanita
- d. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk masukan dalam mengatasi kendala BPD dalam penyusunan peraturan desa.
- e. Masyarakat lebih paham mengenai pentingnya mengembangkan pada kelompok-kelompok wanita.

E. Daftar Istilah

Istilah menjabarkan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep atau makna dari judul, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Upaya dapat juga disebut suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan (Wikipedia, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kibijakan desa (Nurcholis, 2005:140). Pengertian BPD dijelskan pula dalam PP No. 72 Tahun 2005 BPD “merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa” (Pasal 1 Ayat 8). Berdasarkan uraian di atas, BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pelaksanaan kebijakan desa.

3. Pengembangan adalah upaya untuk mengurangi kegiatan penelitian dasar dan terapan ke tujuan komersial, misalnya rancang bangun, konstruksi *pilot plant* dan pabrik (Suharto, dkk, 2006:15). Pengertian yang lain, pengembangan adalah pola pertumbuhan, perubahan secara berlahan (evolusi) dan berubah secara bertahap (Wikipedia, 2012). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna.
4. Peran Wanita. Wanita adalah mitra sejajar pria, baik sebagai perencana dan pelaksana pembangunan maupun pengambil keputusan, perumus kebijaksanaan dan pemanfaat hasil pembangunan (Anan:1999:12). Jadi, peran wanita yaitu apa yang dapat dilakukan wanita dengan status dan kedudukannya sebagai wanita. Secara umum, peran wanita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok; peran yang dimainkan secara langsung dan peran tidak langsung.